

Nama : Mohamad Ghinau Thofadilah
NPM : 2213031098\
Mata Kuliah : Ekonomi Industri
Kelas : 2022C

CASE STUDY

Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam, termasuk nikel, batu bara, kelapa sawit, dan karet. Namun, selama puluhan tahun, Indonesia lebih banyak berperan sebagai eksportir bahan mentah dalam Global Value Chains (GVCs). Contohnya, Indonesia mengeksport bijih nikel ke negara lain, yang kemudian mengolahnya menjadi baterai kendaraan listrik dan menjualnya dengan nilai tambah yang tinggi.

Pemerintah Indonesia kini berusaha mengubah posisi dalam GVC, dari pemasok bahan mentah menjadi produsen barang setengah jadi atau jadi, lewat kebijakan hilirisasi industri, larangan ekspor bahan mentah, dan pemberian insentif investasi dalam pengolahan lokal. Namun, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra, baik dari pelaku industri dalam negeri maupun negara mitra dagang seperti Uni Eropa, yang bahkan menggugat Indonesia ke WTO.

Pertanyaan:

1. Analisis Konteks:
 - a. Apa saja kelebihan dan kekurangan posisi Indonesia dalam GVC saat ini?
 - b. Mengapa Indonesia belum berhasil mendapatkan nilai tambah yang optimal dalam GVC?
2. Evaluasi Kebijakan:
 - a. Apakah kebijakan hilirisasi seperti larangan ekspor bijih nikel dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC? Jelaskan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan geopolitik.
 - b. Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap hubungan Indonesia dengan negara mitra dagang?
3. Sintesis dan Solusi:

Jika Anda adalah penasihat ekonomi pemerintah, strategi apa yang akan Anda usulkan agar Indonesia mendapatkan nilai tambah lebih besar dalam GVC tanpa merusak hubungan dagang internasional?

Jawaban:

1. Analisis Konteks:

- a. Posisi Indonesia dalam rantai nilai global (Global Value Chains/GVCs) memiliki keunggulan sekaligus kelemahan yang saling berkaitan. Kelebihan utama terletak pada melimpahnya sumber daya alam seperti nikel, batubara, dan kelapa sawit, yang menjadikan Indonesia salah satu pemasok bahan mentah terbesar di dunia. Kondisi ini memberikan keuntungan komparatif karena permintaan terhadap komoditas tersebut relatif stabil dan menjadi sumber devisa utama. Selain itu, keberadaan sumber daya tersebut membuka peluang investasi dan menjadi dasar bagi pembangunan industri pengolahan di masa depan.

Namun, ketergantungan yang tinggi pada ekspor bahan mentah juga menjadi kelemahan utama. Posisi Indonesia dalam GVC masih didominasi oleh aktivitas bernilai tambah rendah, sedangkan proses yang menghasilkan nilai tinggi, seperti pengolahan, inovasi, dan pemasaran global, masih dikuasai negara lain. Hal ini menyebabkan penerimaan ekonomi nasional tidak maksimal, meskipun volume ekspor cukup besar. Selain itu, fluktuasi harga komoditas dunia sering kali memengaruhi stabilitas ekonomi domestik.

- b. Kegagalan Indonesia dalam memperoleh nilai tambah optimal disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, investasi pada sektor pengolahan dan riset teknologi masih terbatas, sehingga proses hilirisasi berjalan lambat. Kedua, kebijakan industri sering kali tidak sinkron antarinstansi, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Ketiga, kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung industri belum sepenuhnya memadai. Di samping itu, dominasi perusahaan multinasional dalam rantai pasok global menghambat kemampuan Indonesia untuk menguasai teknologi dan pasar. Dengan demikian, potensi ekonomi besar yang dimiliki belum sepenuhnya terkonversi menjadi kekuatan industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global.

2. Evaluasi Kebijakan:

- a. Kebijakan hilirisasi, seperti larangan ekspor bijih nikel, secara konsep memiliki potensi besar untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Tujuan utamanya adalah memperkuat basis industri nasional melalui pembangunan fasilitas pengolahan bahan mentah di dalam negeri. Dengan cara ini, Indonesia dapat menangkap sebagian nilai tambah yang sebelumnya dinikmati oleh negara pengimpor.

Dari sisi ekonomi, kebijakan ini dapat mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan negara, serta mempercepat proses industrialisasi. Namun efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, ketersediaan energi, dan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa dukungan yang memadai, kebijakan tersebut justru berisiko menimbulkan ketidakseimbangan pasokan dan penurunan ekspor dalam jangka pendek.

Dari sisi geopolitik, kebijakan ini memunculkan konsekuensi yang tidak sederhana. Negara mitra dagang, seperti Uni Eropa, menilai larangan ekspor sebagai bentuk proteksionisme yang melanggar prinsip perdagangan bebas. Hal ini dapat menimbulkan sengketa di forum internasional dan menekan hubungan diplomatik. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan diplomasi pemerintah dalam menjelaskan tujuan dan manfaat kebijakan tersebut bagi pembangunan berkelanjutan.

- b. Kebijakan hilirisasi berdampak langsung pada hubungan perdagangan Indonesia dengan sejumlah negara. Di satu sisi, kebijakan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kemandirian industri dan mendorong investasi domestik. Namun di sisi lain, negara mitra merasa dirugikan karena akses terhadap bahan mentah menjadi terbatas. Kondisi ini dapat menurunkan minat investasi asing dan menimbulkan ketegangan politik, seperti yang terlihat dalam gugatan Uni Eropa di WTO. Agar dampaknya tidak berlarut, pemerintah perlu mengedepankan pendekatan dialog dan kerja sama investasi berbasis saling menguntungkan, sehingga kebijakan hilirisasi tetap berjalan tanpa mengorbankan hubungan ekonomi internasional.

3. Sintesis dan Solusi strategis:

Agar Indonesia memperoleh nilai tambah lebih besar dalam rantai nilai global tanpa merusak hubungan dagang internasional, strategi yang diterapkan perlu bersifat inklusif dan berbasis kemitraan. Pendekatan yang tepat adalah membangun kebijakan hilirisasi yang bertahap, transparan, serta disertai kerja sama internasional yang konstruktif.

Tahap awal yang perlu dilakukan ialah memperkuat ekosistem industri nasional melalui peningkatan kapasitas infrastruktur, energi, serta pengembangan tenaga kerja terampil. Pendidikan vokasi dan program pelatihan berbasis kebutuhan industri harus diperluas agar tenaga kerja lokal mampu beradaptasi dengan teknologi pengolahan dan inovasi baru. Pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi industri yang berinvestasi dalam riset dan transfer teknologi.

Tahap berikutnya ialah memperluas kolaborasi dengan investor asing melalui mekanisme *joint venture* yang memastikan terjadinya alih teknologi dan penguatan rantai pasok lokal. Kerja sama ini dapat mengurangi tekanan diplomatik sekaligus mempercepat penguasaan teknologi strategis. Dalam jangka panjang, diplomasi ekonomi harus diperkuat untuk menjaga kepercayaan mitra dagang. Transparansi dalam kebijakan dan konsistensi regulasi akan menjadi kunci bagi kestabilan hubungan perdagangan.

\Dengan strategi yang seimbang antara kebijakan industri domestik dan diplomasi internasional, Indonesia dapat bertransformasi dari eksportir bahan mentah menjadi produsen bernilai tambah tinggi, sekaligus mempertahankan reputasi sebagai mitra dagang yang terpercaya dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.